

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembiayaan merupakan masalah yang cukup mendasar dalam setiap pengelolaan pendidikan, karena seluruh komponen pendidikan di madrasah erat kaitannya dengan pembiayaan.<sup>1</sup> Menurut Depdiknas bahwa manajemen pembiayaan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan pembiayaan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.<sup>2</sup> Dengan demikian, manajemen pembiayaan di madrasah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur pembiayaan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban pembiayaan sekolah.

Dalam Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab I Pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5) tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Ketentuan UmuM tentang Standar Pembiayaan pada Pasal 1 adalah mencakup standar yang mengatur komponen dan besarnya “biaya operasi”

---

<sup>1</sup> Mukhamad Sukur Rita Pusvitasari, —Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan (Studi Kasus Di Sd Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo),| Jurnal Altanzim Manajemen Pendidikan Islam 4 (2020).

<sup>2</sup> Ismail, —Implementasi Manajemen Pembiayaan Dalam Pengelolaan Dana Bos,| Manajemen Pendidikan Islam 5 (2020): 3.

satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pada Pasal 62 mencakup “biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal”. Pada Bab IX: Standar Pembiayaan, Pasal 62 disebutkan bahwa: 1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal, 2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap, 3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan, 4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi danlain sebagainya,

Dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa sumber daya pendidikan adalah merupakan pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang berwujud tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan

pemerintah, baik sendiri maupun bersama-sama. Pada pasal yang lain disebutkan secara lebih jelas bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan/atau keluarga peserta didik.<sup>3</sup>

Mengenai Pembiayaan Pendidikan Fattah (2001) memaparkan bahwa kualitas pendidikan dipengaruhi oleh biaya. Biaya yang rendah akan berimplikasi terhadap kualitas pendidikan dan proses pembelajaran, sehingga pada gilirannya akan menurunkan kualitas outcome yang dihasilkan, dengan demikian perencanaan pendidikan harus memanfaatkan, mengawasi penggunaan dan melakukan analisis pembiayaan.

Pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua sebagai pihak pertama, pemerintah memberikan insentif berupa bantuan operasional pendidikan salah satu permasalahan yang dihadapi penyelenggara pendidikan adalah terkait sumber dana pendidikan. Selama ini ketergantungan biaya pendidikan bagi sebagian besar sekolah swasta terutama madrasah bersumber dari pemerintah. Partisipasi pembiayaan dari orang tua siswa mengambil porsi yang sedikit, sementara partisipasi masyarakat dalam bentuk donasi hanya terjadi pada madrasah yang memiliki keterkaitan secara keorganisasian atau ideology. Masalah berikutnya adalah dalam lemahnya

---

<sup>3</sup> UU NO 20 THN 2003 Tetang system Pendidikan Nasional

pengelolaan, mimimnya pengetahuan tentang mengelola pembiayaan, penggunaan pembiayaan yang tidak tepat sasaran, tidak transparan atau tidak *akuntable* terutama untuk dana bantuan operasional dari pemerintah (BOS) laporan ICW (Indonesian Corruption Watch) sejak Januari 2017 hingga September 2021 tercatat 240 kasus korupsi pendidikan dana BOS menyebabkan kerugian Negara Rp.1,6 Triliun.<sup>4</sup>

Perencanaan pembiayaan Di Madrasah sebagian besar masuk dalam penyusunan RKM yang disusun secara efektif dan efisien, hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Fattah bahwa dalam penyusunan anggaran tentang bagaimana memanfaatkan dana secara efisien, mengalokasikan dana secara tepat, sesuai dengan skala prioritas.

Pengalokasian dana di dunia pendidikan ialah suatu penanaman modal pada pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia tidak mungkin mempunyai keterampilan tinggi tanpa sentuhan pendidikan. Sentuhan pendidikan yang dapat menciptakan keterampilan tinggi tidak mungkin dijalankan apa adanya, dengan pendanaan yang terlalu rendah.

Manajemen Pembiayaan menjadi salahsatu aspek terpenting dalam proses manajemen Pendidikan. Karena

---

<sup>4</sup> Indonesian Corruption Watch. "korupsi dana pendidikan <http://aclc.kpk.go.id>., (diakses 15 juli 2025)"

hampir setiap kegiatan manajerial dilingkungan Pendidikan akan membutuhkan anggaran dana, dalam pengelolaannya dibutuhkan orang yang profesional untuk menangani hal tersebut.<sup>5</sup> Pembiayaan merupakan hal penting dalam keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan dan pemerintahan memiliki peranan penting didalamnya hal ini sejalan dengan pendapatnya West dalam Chon, pemerintah mencakup pada perlindungan perlindungan anak dibawah umur, pengaruh *eksternal* peran Pendidikan agar demokrasi berjalan, pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan bagi semua warga negara, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta tuntutan “norma umum” dan pengaruh Pendidikan.<sup>6</sup>

Adapun sumber anggaran Pendidikan pada umumnya ada Tiga yaitu 1). Dana BOS ( Biaya Oprasional Sekolah) yang jumlah dananya akan dikalikan sesuai dengan jumlah siswa yang ada disuatu Lembaga Pendidikan tertentu. 2). BOPD ( Biaya Oprasional Pendidikan Daerah) yang dananya digunakan untuk upah guru baik PNS ataupun honorer. 3). Dana iuran siswa ataupun disebut SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) yang biasanya digunakan untuk pemenuhan sarana dan prasana belajar siswa.

---

<sup>5</sup> Feiby Ismail, “Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung” Sulawesi Utara), Vol 5, No 1, Thn2020

<sup>6</sup> Prof.Dr. Akdon M.Pd.DKK, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan” PT remaja rosdakarya(2017)Hal 26

Dalam pelaksanaannya proses manajemen pembiayaan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan termasuk pengadaan sarana dan prasana.

Perencanaan pembiayaan sarana prasarana dilakukan pada awal tahun dalam rapat perencanaan anggaran sekolah dengan melibatkan, Kepala madrasah, wakamad sarpras, bendahara, dan guru. Dengan mengacu pada skala prioritas tertentu. Oleh karena itu tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu aspek penting untuk memajukan pendidikan adalah aspek pembiayaan Pendidikan. Dimana manajemen pembiayaan Pendidikan itu menjadi hal yang sangat vital terlebih sangat berpengaruh terhadap sarana prasana Pendidikan karena sarana dan prasana yang mumpuni tidak bisa dicapai apabila manajemen pembiayaan yang ada disekolah tidak dilakukan dengan baik.

Hasil suatu perencanaan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengendalian, bahkan penilaian untuk perbaikan selanjutnya. Oleh karena itu perencanaan sarana dan prasarana harus dilakukan dengan baik dengan memperhatikan persyaratan dari perencanaan yang sudah dilakukan. Perencanaan yang matang dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya kesalahan dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi pengadaan sarana prasarana. Kesalahan dalam tindakan berupa kesalahan membeli barang yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan,

jumlah dana yang tersedia, tingkat kepentingan dan tingkat kemendesakan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang yang telah disebutkan diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil ialah :

1. Bagaimana perencanaan anggaran Di MAS YPP Babakan Jamanis ?
2. Bagaimana perencanaan anggaran sarana prasarana Di MAS YPP Babakan Jamanis ?
3. Bagaimana proses pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Di MAS YPP Babakan Jamanis ?
4. Bagaimana evaluasi pengadaan sarana prasaran pendidikan Di MAS YPP Babakan Jamanis?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan sebagai salasatu upaya menggambar secara rinci situasi manajemen pembiayaan Di MAS YPP Babakan Jamanis.
2. Menganalis proses dalam pengadaan sarana dan prasana Pendidikan khususnya Di MAS YPP Babakan Jamanis.

3. Menganalisis proses manajemen pembiayaan Di MAS YPP Babakan Jamanis dalam melakukan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.
4. Menganalisis proses evaluasi pengadaan sarana prasaran pendidikan Di MAS YPP Babakan Jamanis.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini yakni sebagai berikut :

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta menjadi rujukan mengenai manajemen pembiayaan disekolah untuk pengembangan sarana dan prasarana Pendidikan, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

##### **b. Manfaat Praktis**

1. Bagi peneliti dan penulis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori manajemen pembiayaan pendidikan bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini. Serta diharapkan menjadi sarana yang bermanfaat dalam meningkat

kan pengetahuan penulis mengenai manajemen pembiayaan dan nya di sekolah negeri.

2. Bagi orang yang melakukan manajemen pembiayaan sekolah penelitian ini diharapkan dapat membantu kerja orang yang melakukan manajerial sekolah dalam mengimplemntasikan teori manajemen pembiayaan di sekolah. Sehingga manajer pembiayaan sekolah dapat bekerja lebih efektif dan efisien dan tepat sasaran dalam pengalokasian anggaran.
3. Bagi sekolah dengan adanya penelitian ini dapat memberikan rekomendasi terkait pengadaan sarana dan prasarana belajar dikarenakan pengalokasian anggaran lebih tepat sasaran dan proporsional.

#### **E. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Kajian penelitian merupakan informasi yang penting untuk dapat mengidentifikasi kerangka penelitian. Penelitian terdahulu merujuk pada penelitian lampau, berikut penelitian terdahulu tentang “ manajemen pembiayaan terhadap pengadaan sarana dan prasarana” :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rita Pusvitasari, Mukhamad Sukur tentang “Manajemen Pembiayaan Sekolah Dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan (Studi Kasus Di SD Muhammadiyah 1

Krian, Sidoarjo)” Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Tujuan penelitiannya Menganalisis dan memahami tentang manajemen pembiayaan sekolah dalam pemenuhan sarana dan prasana Pendidikan Di SD Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo)” Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Jawa Timur. Penelitian ini memiliki 2 aspek yang diteliti yakni Manajemen pembiayaan dan sarana prasana Pendidikan metode penelitian yang dilakukan ialah metode kualitatif hasilnya Dalam melakukan penelitian ini hasil yang didapatkan ialah manajemen pembiayaan memberikan substansi yang sangat besar terhadap pemenuhan sarana dan prasana.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Raudhah Farah Dilla tentang “manajemen pembiayaan Pendidikan anak usia dini perspektif *Wealt Manajemen : Study* di TK Ceria Demangan Baru Yogyakarta”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui manajemen pembiayaan pada Lembaga Pendidikan anak usia dini dalam perspektif *Wealt Manajemen* aspek yang diteliti pada penelitian ini yakni manajemen pembiayaan Pendidikan dengan menggunakan metode kualitatif, Perbedaanya dengan penelitian yang saya lakukan yakni pada aspek yang diteliti, dimana aspek yang

saya teliti memiliki 2 aspek sedangkan pada penelitian terdahulu ini hanya memiliki satu aspek yang diteliti.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ghazali Adillah tentang “Manajemen Pembiayaan Sekolah”. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pengelola pembiayaan sekolah di SMP nomor 1 Tebat Karai Kabupaten Kapahiang. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini ialah manajemen pembiayaan sekolah metode yang digunakan ialah metode kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan sekolah dimulai dengan merancang perencanaan dan pembiayaan sekolah, Perbedaanya dengan penelitian yang saya lakukan yakni pada aspek yang di teliti, dimana aspek yang saya teliti memiliki 2 aspek sedangkan pada penelitian terdahulu ini hanya memiliki satu aspek yang diteliti.

## **F. Kerangka Berpikir**

### **a. Manajemen**

Istilah manajemen berasal dari kata *management*, turunan dari kata *to manage* artinya: mengurus/tata laksana/ketatalaksanaan. Manajemen diartikan bagaimana cara manajer(orangya)mengatur, membimbing dan memimpin semua orang yang menjadi

pembantunya agar usaha yang sedang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>7</sup>

Menurut Usman kata “manajemen” berasal dari bahasa latin “*manus*” yang berarti “tangan” dan “*agere*” yang berarti “melakukan” dari dua kata tersebut yang sama-sama mempunyai arti yang terkandung didalamnya merupakan arti secara etimologi. Selanjutnya kata “*manus*” dan “*agere*” digabung menjadi “*managere*” yang mengandung arti menangani. Dalam bahasa Indonesia “*manjement*” di terjemahkan menjadi manajemen yang mengandung arti “*pegelolaan*”<sup>8</sup>.

Manajemen sebagai suatu proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing aktivitas suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ordway Tead, , Istilah perangkat yang dimaksud dalam pandangan tersebut adalah pemimpin suatu organisasi. Sedangkan menurut Atmosudirdjo manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan apa yang harus diselesaikan.

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta

---

<sup>7</sup> Prof.Dr.Hj. SEDARMAYANTI, M.Pd.,APU. Manajemen Strategi,Bandung,PT Refika Aditama 2018,hal 1

<sup>8</sup> Abd. Rohman, 2018 “*dasar-dasar manajemen publik*”. Malang: citra intrans selaras, hal.09

mencapai tujuan memulai pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya Terry. Manajemen sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir dan sesuai dengan jadwal Griffin,.

Menurut Robbins dan Coulter Manajemen atau pengelolaan adalah hal yang dilakukan oleh para manajer. manajemen melibatkan aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain. Manajemen juga tersusun secara sistematis dan teratur. Ambrita berpendapat bahwa manajemen pembelajaran berarti kemampuan guru Untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, melalui kegiatan yang menciptakan dan membangun kerja sama, sehingga terbentuknya pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di kelas secara efektif dan efisiensi.<sup>9</sup>

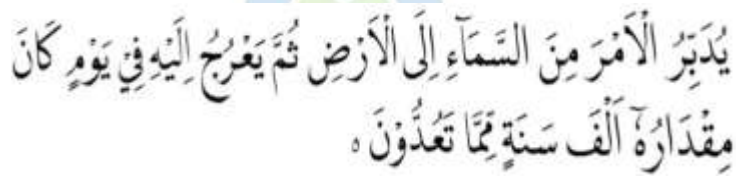
Selain dari pada itu konsep manajemen juga tertulis dalam Alqur'an yang sering disebut manajemen qur'ani yakni kegiatan manajerial yang berlandaskan kepada nilai-nilai Alqur'an . alqur'an sebagai kitab suci yang diturunkan Allah kepada Manusia mengandung banyak nilai yang

---

<sup>9</sup>Rheja fratama, 2020 "*Pengantar Manajemen*" yogyakarta: Cv Budi utama, hal 07

dapat dijadikan pedoman manusia dalam bertindak, berperilaku, berorganisasi, bergaul, dan lain sebagainya.

Menurut Ramayulis istilah manajemen dalam alqur'an disebut dengan istilah "At-Tadbir" ( Pengaturan ) kata ini merupakan derivasi dari kata "Dabbara" "Mudabbir" yang berarti Pengelola/Pengurus. Kata "Yudabbiru" dalam Al-Qur'an terdapat pada QS. AS- SAJDAH [32] : 5 berikut ini.<sup>10</sup>



يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ  
مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ه

Artinya : "Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi,kemudia (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari lamanya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu (QS ; Assajdah) [32;5].<sup>11</sup>

## **b. Manajemen Pembiayaan**

Manajemen pembiayaan merupakan salah satu fungsi operasional yang berkaitan dengan pengolahan pembiayaan yang pada dasarnya bisa dilakukan oleh individu, perusahaan,pemerintahan maupun lembaga Pendidikan, maajemen pembiayaan memiliki fungsi penting dalam

---

<sup>10</sup> Zainal Arifin,Tafsir Ayat-Ayat Manajemen, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020),HLM 103

<sup>11</sup> Al-Qur'an, Surrat Assajdah, Ayat 5

perkembangan suatu lembaga, manajemen pembiayaan adalah salahsatu bidang ilmu pengetahuan yang penting.

Menurut Harjito dan Martono manajemen keuangan (*financial management*) atau dalam literatur lain disebut pembelanjaan, adalah segala aktifitas yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana dan mengelola asset sesuai tujuan secara menyeluruh, dengan kata lain manajemen pembiayaan merupakan manajemen pembiayaan merupakan manajemen pengelolaan mengenai bagaimana memperoleh asset untuk mencapai tujuan.

Menurut Sutrisno manajemen pembiayaan atau sering disebut pembelajaan dapat diartikan semua aktivitas yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana serta usaha menggunakan dan mengalokasikan dana secara efisien.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan adalah suatu usaha mendapatkan dana serta suatu usaha pengelolaan pengalokasian dana supaya lebih efisien.

### **c. Manajemen Pembiayaan Madrasah**

Manajemen pembiayaan di madrasah menjadi salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan karena dari manajemen tersebut kepala madrasah bisa menentukan dari mana sumber pembiayaan yang bisa digali

seperti yang diungkapkan oleh Satridjo Budiwibowo yang mendefinisikan bahwa manajemen pembiayaan di madrasah berkenaan dengan kiat-kiat madrasah dalam menggali sumber dana, mengelola dana yang berkaitan dengan program tahunan madrasah, mengadministrasikan dana, serta melakukan upaya pengawasan, pengendalian, dan juga pemeriksaan. Inti dari manajemen pembiayaan adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan pendidikan.<sup>12</sup>

Selanjutnya Matin mengungkapkan bahwa manajemen pembiayaan terdiri dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi berikut pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan, serta pemeriksaan dan pengawasan anggaran.<sup>13</sup>

Selain itu JF. Bradley juga berpendapat bahwa manajemen pembiayaan merupakan bidang yang bertujuan untuk mengelola penggunaan modal secara bijaksana, selektif dan seksama dari sumber modal untuk memungkinkan unit pengeluaran untuk bergerak kearah mencapai tujuannya.<sup>14</sup>

Dalam mengelola pembiayaan, madrasah dalam hal ini pimpinan atau kepala madrasah harus membuat perencanaan pembiayaan, bagaimana cara mendapatkan

---

<sup>12</sup> Satridjo Budiwobowo Dan Sudarmiani, *Manajemen Pendidikan*, 65.

<sup>13</sup> Sujari Rahmanto, *Manajemen Pembiayaan Sekolah* (Yogyakarta: Cv. Gre Publishing, 2019),

<sup>14</sup> Rezky Na'im Dan Asma, *Pengantar Manajemen*,

dana baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, setelah itu akan membuat perencanaan juga untuk penggunaan dana tersebut guna mendukung jalannya kegiatan dan keberhasilan program yang telah direncanakan. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Robson yang dikutip oleh Siti Aisyah dkk, bahwa —pengelolaan pembiayaan pendidikan merupakan salah satu pondasi penting dalam mengelola sekolah yang akan ikut menentukan jalannya kegiatan pendidikan di madrasah yang dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian.<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan manajemen pembiayaan di madrasah dimulai dari kegiatan merencanakan anggaran dari berbagai sumber dan penggunaannya, serta melakukan pencatatan terhadap pelaksanaan pembiayaan, mengevaluasi penggunaan dana tersebut dengan pertanggungjawaban berupa hasil program kegiatan dan pertanggungjawaban berupa laporan pembiayaan kepada semua pihak yang ada di lingkungan madrasah secara jujur dan terbuka.

Perencanaan pembiayaan di madrasah sebagian besar masuk dalam penyusunan RKAM yang disusun secara

---

<sup>15</sup> Yuniningsih Siti Aisyah, Febrianty, Heri Dia Anata Batubara, Indra Siswanti, Jony, Supitriyani, Astuti, Ady Inrawan, Citrawati Jatiningrum, *Manajemen Keuangan*, Ed. Wahyuddin (Yayasan Kita Menulis, 2020), 100.

efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Fattah bahwa dalam penyusunan anggaran adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efisien, mengalokasikan secara tepat, sesuai dengan skala prioritas.<sup>16</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 yaitu tentang pendanaan pendidikan diatur berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

#### 1. Prinsip keadilan

Berarti bahwa besarnya dana pendidikan yang di dapatkan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

#### 2. Prinsip kecukupan

Berarti bahwa pengalokasian dana pendidikan cukup terbiang untuk bisa membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).

#### 3. Prinsip keberlanjutan

Berarti bahwa dana pendidikan bisa digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang memenuhi SNP.

---

<sup>16</sup> Sunedi dkk, Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, and Zulfa Jamalie, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Masyarakat : Studi Pada MTs Darul Ulum Palangka Raya" Volume 9, No. 1, 2017h. 40.

Landasan hukum standar pembiayaan pendidikan di Indonesia berdasar kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003, Bab XIII.

a. Pasal 46 (1): Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

b. Pasal 46 (2): Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945.

c. Pasal 46 (3): Ketentuan mengenai tanggungjawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

d. Pasal 47 (1): Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan.

e. Pasal 47 (2): Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Pasal 47 (3): Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayt (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

g. Pasal 48 (1): Pengelolaan dana pendidikan berdasar pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

h. Pasal 48 (2): Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

**d. Sarana dan prasana Pendidikan**

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat vital dan hal yang sangat penting dalam menunjang kelancaran atau kemudahan dalam proses pembelajaran, dalam kaitannya dengan pendidikan yang membutuhkan sarana dan prasarana dan juga pemanfaatannya baik dari segi intensitas maupun kreatifitas dalam penggunaannya baik oleh guru maupun oleh siswa dalam kegiatan belajar mengajar.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana

adalah merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses.

Depdiknas (2003) telah membedakan antara sarana dan prasana Pendidikan. Sarana Pendidikan adalah seluruh perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses Pendidikan di sekolah. Berkaitan dengan ini prasana Pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses Pendidikan di sekolah.

Maka dari itu pemerintah berupaya mewujudkannya melalui Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 57 THN 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional, BAB II Lingkup Standar Nasional Pendidikan bagian ke- 5 mengenai Standar Sarana dan prasana Pendidikan.

Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang tersedia pada Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan. Sarana sebagaimana dimaksud merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Standar sarana dan prasarana dapat diartikan penyesuaian terhadap bentuk, spesifikasi, kualitas, dengan kriteria minimum yang telah ditetapkan upaya mewujudkan

akuntabilitas dan transparansi publik serta meningkatkan kinerja dalam proses penyelenggaraan sekolah.<sup>17</sup>

Prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi Satuan Pendidikan.

Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditentukan dengan prinsip: a.) menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif b.) menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan c.) ramah terhadap penyandang disabilitas dan ramah terhadap kelestarian lingkungan.

Sarana dan prasarana harus tersedia pada Satuan Pendidikan dan disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.<sup>18</sup>

Kerangka berpikir dalam penulisan ini bertujuan sebagai arah untuk memahami alur pemikiran penelitian, sehingga analisis yang dilakukan akan lebih sistematis dan sesuai dengan tujuan penulisan. Kerangka berpikir di bawah menggambarkan alur logika penelitian dengan judul “ manajemen pembiayaan dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Di MAS YPP Babakan Jamanis”

---

<sup>17</sup> Rijaldi,. Fahrul Islam. (2017). Standardisasi Manajemen Sarana dan Prasarana dalam menunjang Pendidikan. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal. 25.

<sup>18</sup> Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 57 THN 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional

Adapun uraian kerangka berpikir dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada Kepala Madrasah, tenaga pendidik dan kependidikan, guru atau pelatih ekstrakurikuler serta pihak-pihak terkait. Sebelum terjun langsung kelapangan, peneliti melakukan kajian teori terlebih dahulu. Penelitian ini berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Nanang Fattah mengenai pembiayaan Pendidikan yakni “pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang pengadaan peralatan/mobile, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi Pendidikan”

*Kedua*, hasil dari teori diatas akan menghasilkan jawaban dari rumusan masalah dan fokus penelitian serta menjadi tujuan penelitian.

*Ketiga*, dari beberapa tahapan proses diatas akan mendapatkan hasil dari penelitian yaitu tentang Manajemen Pembiayaan Dalam Pengadaan Sarana Dan Prasana Belajar Di MAS YPP Babakan Jamanis. Dari

penjelasan diatas kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1.1 Kerangka berfikir 1**